**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Gambaran Umum Perangkat Daerah**



Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang sosial, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Permasalahan Strategis di Bidang Sosial meliputi:

1. Rendahnya sistem kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan yang dilakukan seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sakip dan Tingkat Kepuasan Masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan untuk penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

Hal ini berkaitan dengan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 2 Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dinas Sosial terletak pada titik koordinat latitude -6.1309989, longitude 120.4583483 yang beralamat Jl. Sosial Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, No.1 Telp.(0414)21691 Kepulauan Selayar, Email: [dinassosialkabselayar@gmail.com](mailto:dinassosialkabselayar@gmail.com).

* 1. **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 126 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas:
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

1. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;
2. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;
3. penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi , dan pelaporan, dalam lingkup Dinas;
4. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. melakasanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
2. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. **Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

* 1. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  2. pelaksanaan kibjakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  4. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan kebijakan tekhnis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
7. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. melaksanakan teknis fasilitasi,koordinasi,pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;
9. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan social
10. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
11. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
12. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;
13. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
14. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
15. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 3 (Tiga) kegiatan antara lain dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota:  
   a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial   
    Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keseahteraan Sosial   
 Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Pantai Sosial :

a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

b. Penyediaan Permakanan

c. Penyediaan Alat Bantu

d. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga

e. Pemberian Layanan Rujukan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3. **Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
4. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial;dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
7. melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
8. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
9. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
10. melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
11. melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;
12. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
13. melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
14. melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
15. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menangani 3 (Tiga) kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Alat Bantu
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis dan Masyarakat
7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemberian layanan kedaruratan
10. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12. Pemberian Layanan Rujukan
13. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.
14. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota
15. Kegiatan Pemeliharaan Anak – anak Terlantar .
16. Penjangkauan Anak-anak Terlantar
17. Rujukan anak-anak terlantar
18. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
2. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
7. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
8. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar ( kategori sangat terlantar);
9. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
11. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani 3 (Tiga) kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan antara lain :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2. Penyediaan Permakanan
3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
4. Penyediaan Permakanan
5. Penyediaan Sandang
6. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
7. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota.
8. Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL**

**Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISISASI**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIS**

**SUBAG UMUM,**

**KEPEGAWAIAN DAN HUKUM**

**SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN**

**BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN**

**BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

**KELOMPOK FUNGSIONAL**

* 1. **Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural**

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2023 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) orang, Kontrak Pusat sebanyak 2 (dua) Orang, dan PTT sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan/Ruang** | **Jumlah** |
| 1 | I/a | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 3 | I/c | - orang |
| 4 | I/d | - orang |
| 5 | II/a | - orang |
| 6 | II/b | - orang |
| 7 | II/c | - orang |
| 8 | II/d | 5 orang |
| 9 | III/a | 3 orang |
| 10 | III/b | 2 orang |
| 11 | III/c | 4 orang |
| 12 | III/d | 3 orang |
| 13 | IV/a | 2 orang |
| 14 | IV/b | 2 orang |
| 15 | IV/c | - orang |
| **Jumlah** | | **22 Orang** |

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (Dua) orang.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**

**Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1 | Magister S2 | 4 orang |
| 2 | Sarjana S1 | 13 orang |
| 3 | Diploma III | - orang |
| 4 | SMA/Sederajat | 5 orang |
| 5 | SMP/Sederajat | - Orang |

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dengan diimbangi oleh aparatur yang berpendidikan lebih tinggi serta mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

**Tabel 1.3**

**Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | TKSK | | PKH | | TAGANA | |
| L | P | L | P | L | P |
| 1 | BENTENG | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | BONTOSIKUYU | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | BONTOMATENE | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | BUKI | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PASIMASUNGGU | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PASIMASUNGGU TIMUR | 1 | - | `3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PASILAMBENA | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | - | 2 |  | 1 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | - | 1 | 4 |  | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 8 | 3 | 17 | 13 | 11 | 11 |

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. Implementasi ketersediaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

**BAB II**

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH**

**2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Capaian Kinerja atau di sebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjana untu seluruh indicator kinerja yang ada, diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja memuat Informasi tentang sasaran yang ingin di capai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian.Pencapian kinerja sasaran dilakukan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memndapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas – aktivitas yang terukurbersifat tahunan dari program – program yang telah diterapkan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023** | | | | | | | | | |
| **NO.** | **URUSAN SOSIAL** | **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA** | **KEBIJAKAN** | **URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **TARGET** | **REALISASI** | **PERMASALAHAN** | **UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN** | **TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD** |
|  |
| 1. | Dinas sosial | Dinas Sosial | RKA Anggaran Tahun 2023 dan DPA Anggaran 2022 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota** | **100%** | **95,57%** |  |  |  |  |
| **Alokasi Anggaran Rp. 3.290.765.000** | **Realisasi Anggaran Rp. 3.145.063.288** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi *Anggaran* Rp. 167.940.000** | **Realisasi Anggaran Rp. 167.787.020** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.950.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.3.374.000 | Realisasi Anggaran Rp.3.370.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.6.626.000 | Realisasi Anggaran Rp.6.626.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.4.460.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.440.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.540.000 | Realisasi Anggaran Rp5.540.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.5.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evalausi Kinerja Peragkat Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.132.940.000 | Realisasi Anggaran Rp.132.861.020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | **100%** | **93,91%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.1.929.025.000** | **Realisasi Anggaran Rp.1.811.632.430** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang | 24 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.909.025.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.791.902.430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.15.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.14.830.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.900.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Administrasi Barang Milik Daerah*** | **100%** | **98,80%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.5.000.000** | **Alokasi Anggaran Rp.4.940.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Alokasi Anggaran Rp.4.940.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100,00%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.5.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.4.950.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Sub Kegiatan :** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.950.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.635.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.634.144.933** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor | 2 Paket | 2 Paket |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.5.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 1 Paket | 12 Bulan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.15.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.14.995.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.9.150.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.605.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.604.999.933 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah*** | **100%** | **93,24%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp. 322.060.000** | **Realisasi Anggaran Rp.300.298.006** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.4.992.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.100.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.87.916.806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1 Laporan | 1 Laporan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.217.060.000 | Realisasi Anggaran Rp.207.389.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | **100%** | **97,61%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.226.740.000** | **Realisasi Anggaran Rp.221.310.899** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 52 Unit | 52 Unit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.125.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.119.672.399 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 8 Unit | 8 Unit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.5.640.000 | Realisasi Anggaran Rp.5.640.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan aset tetap lainnya | 10 Unit | 10 Unit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.6.100.000 | Realisasi Anggaran Rp.5.999.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitas gedung, Kantor dan Bangunana lainya | 1 Unit | 1 Unit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.90.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.89.999.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Sosial** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.250.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.249.141.600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.250.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.249.141.600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota | 11 Orang | 11 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.50.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.49.497.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota | 2 Karang Taruna | 2 Karang Taruna |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.200.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.199.644.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Rehabilitasi Sosial** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.3.806.977.000** | **Realisasi Anggaran Rp3.793.036.800** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelendangan Pengemis di Luar Panti Sosial*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.1.522.457.000** | **Realisasi Anggaran Rp1.518.277.400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan permakanan | 208 Orang | 216 KPM |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.934.303.000 | Realisasi Anggaran Rp.931.255.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyedian Sandang | 90 Orang | 60 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.145.200.000 | Realisasi Anggaran Rp.145.160.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan alat bantu | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.750.000 | Realisasi Anggaran Rp.750.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Pelayanan Renufikasi Keluarga | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.940.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelendangan pengemis dan masyarakat | 30 Orang | 30 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.170.504.000 | Realisasi Anggaran Rp.170.450.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.940.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.970.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian layanan kedaruratan | 40 Orang | 20 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.125.400.000 | Realisasi Anggaran Rp.125.256.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.940.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 10 Orang | 10 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.970.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberiaan layanan rujukan | 30 Orang | 30 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.140.300.000 | Realisasi Anggaran Rp.139.645.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.2.284.520.000** | **Realisasi Anggaran Rp.2.274.759.400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian layanan data dan pengaduan | 10558 KPM | 10558 KPM |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.95.200.000 | Realisasi Anggaran Rp.94.545.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan permakanan | 330 KK | 330 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.293.430.000 | Realisasi Anggaran Rp.290.280.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan alat bantu | 486 KK | 486 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.1.339.500.000 | Realisasi Anggaran Rp.1.339.396.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 70 Orang | 70 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.59.200.000 | Realisasi Anggaran Rp.58.982.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberiaan pelayanan reunifikasi keluarga | 9 Orang | 9 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.75.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.74.240.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemberian layanan rujukan | 31 KK | 31 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.388.590.000 | Realisasi Anggaran Rp.383.724.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota | 3 Dokuemn | 3 Dokuemn |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.33.600.000 | Realisasi Anggaran Rp.33.591.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.193.380.000** | **Realisasi Anggaran Rp.193.163.800** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar*** | **100,00%** | **100,00%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.100.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.99.910.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penjangkauan anak-anak terlantar | 30 Orang | 30 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.30.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.29.910.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rujukan anak-anak terlantar | 30 Orang | 30 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.70.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.70.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota*** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggran Rp.93.380.000** | **Realisasi Anggaran Rp.93.253.800** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota | 24.929 KK | 24.929 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.93.380.000 | Realisasi Anggaran Rp.93.253.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Penanganan Bencana** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.406.493.000** | **Realisasi Anggaran Rp.391.196.400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggran Rp.173.701.000** | **Realisasi Anggaran Rp.160.054.400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Makanan | 40 KK | 40 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.87.035.000 | Realisasi Anggaran Rp.86.853.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Sandang | 30 KK | 30 KK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.56.946.000 | Realisasi Anggaran Rp.55.548.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 10 Unit | 10 Unit |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggran Rp.29.720.000 | Realisasi Anggaran Rp.17.652.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/ Kota** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.232.792.000** | **Realisasi Anggaran Rp.231.142.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 22 Orang | 22 Orang |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.232.792.000 | Realisasi Anggaran Rp.231.142.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.20.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.19.963.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota** | **100%** | **100%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Alokasi Anggaran Rp.20.000.000** | **Realisasi Anggaran Rp.19.963.000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | 28 Makam | 28 Makam |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alokasi Anggaran Rp.20.000.000 | Realisasi Anggaran Rp.19.963.000 |  |  |  |  |

**2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2023, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja IKU Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja IKU Dinas Sosial 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial | 75,5 % | 46.38 % | 61.43 % |
|  |  | Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 75 % | 67,48 % | 89.98 % |
| Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 90 % | 67,07 % | 67,85 % |
| 2 | Meningkanya Penanganan Korban Bencana | Persentase Penanganan Korban Bencana | 100 % | 100 % | 100 % |

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022.

1. ***Sasaran “Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)”***

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya yaitu:

* 1. ***Persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan sosial***

Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

* Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 11 (Sebelas) orang pendamping TKSK di setiap kecamatan.
* Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 4 (Empat) orang pendamping anak se Kabupaten Kepulauan Selayar.
* Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini Berupa Bimbingan dan peningkatan kesejahteraan kepada karang taruna dengan target 2023 sebantak 1 karang taruna kabupaten dengan jumlah anggota sekitar 50 orang.

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan antara lain:

* Penyediaan Alat Bantu dengan target 486 KK dan terealisasi sebanyak 486 KK, dengan jenis bantuan yang diberikan berupa peralatan Perbengkelan, Kawat duri, paket jualan Sembako, Mesin Senso, Bibit Sapi, Dari, alat Pertukangan dll.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 75.5 % berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan pemberdayaan sebanyak 551 KK dan yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan sebanyak 1.188 KK sesuai dengan jumlah PPKS usia produktif, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 46,38 %. Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 61,43 %*

Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2023.

* 1. ***Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial***

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas juga merupakan kegiatan yang mendukung pancapaian penerapan tandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yaitu antara lain :

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

* Penyediaan Permakanan yang diperuntukkan khusus untuk anak terlatar/yatim piatu, lansia terlantar dan penyandang disabilitas dengan target sebanyak 208 Orang dan terealisasi juga sebanyak 208 Orang dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (Tuga Juta Enam ratus Ribu Rupiah) per Orang.
* Penyediaan Sandang merupakan kegiatan dengan target sebanyak 90 Orang dan terealisasi sebanyak 90 Orang, dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Penyediaan alat bantu, dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran para penyandang disabilitas.
* Pemberian Layanan Renufikasi Kluarga, dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelendangan pengemis dan Masyarakat. dengan target sebanyak 30 Orang dan realisasi sebanyak 30 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat nikah dan lartu identitas anak, dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian layanan kedaruratan, yang diperuntukkan khusus untuk anak yang berhadapan hukum (ABH) dengan penanganan berupa pendampingan dan mediasi, dengan jumlah anak yang berhasil didampingi dan dimediasi selama tahun 2023 adalah sebanyak 40 anak.
* Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian Pelayanan Penelusuran Kluarga, dengan target sebanyak 10 Orang dan realisasi sebanyak 10 Orang dengan sasaran Anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan lansia.
* Pemberian Layanan Rujukan, sub kegiatan ini memfasilitasi para ODGJ (Orang dengan gangguan Jiwa) untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan secara insentif dari pihak-pihak terkait. Jumlah ODGJ yang berhasil difasilitasi selama tahun 2031 adalah sebanyak 30 orang.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan antara lain:

* Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, kegiatan ini memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran BPNT/Program Sembako di 88 desa/Kel, dengan jumlah penerima bantuan BPNT sebanyak 10.518 KPM dengan bantuan berupa Uang senilai Rp. 200.000,- per KPM.
* Penyediaan Permakanan, dengan target sebanyak 330 KK dengan bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 40 Kg/KK, dan terealisasi 100 %.
* Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga, kegiatan ini diperuntukkan khusus untuk keluarga/ahli waris pahlawan dan pelaksanaan anjangsana dalam rangka peringatan Hut RI dengan target 9 Orang dan terealisasi sebanyak 9 Orang.
* Pemberian Layanan Rujukan, kegiatan ini berupa pemberian bantuan rumah tidak layak huni denganbantuan sebanyak Rp. 10.000.000,-/KPM dalam bentuk barang, target sebanyak 31 KK dan terealisasi 100 %

Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar, dengan 2 (Dua) sub Kegiatan antara lain :

* Penjangkauan anak-anak terlantar, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk tahun 20223 anak-anak yang berhasil di jangkau sebanyak 30 anak.
* Rujukan anak-anak terlantar, kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak terlantar yang mendapatkan bantuan sembako yakni sebanyak 30 orang anak.

Kegiatan Pelayanan pada Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), SLRT juga merupakan salah satu program dari Kementrian Sosial berupa Pemberian Layanan dan Rujukan Terpadu, dalam hal ini pemberian layanan berupa rekomendasi PIP (Program Indonesia Pintar) dan Reaktivasi PBI-JKN (Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan), jumlah yang telah dilayani sesuai dengan hasil registrasi Sekretariat SLRT sebanyak 225 rekomendasi 251.

Bantuan dari Balai Sentra Pangurangi Kementerian Sosdial untuk Penyandang disabilitas dengan bentuk bantuan Berupa Sembako,Alat pertukangan,Perlengkapan diri, Nutrisi,Kursi roda. Jumlah penerima bantuan penyandang disabilitas untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebanyak 88 KPM.

Bantuan dari Balai Sentra Pangurangi Kementerian Sosdial untuk Lansia dengan bentuk bantuan Berupa Sembako, Perlengkapan diri. Jumlah penerima bantuan Lansia untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebanyak 100 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2023 sebanyak 11.855 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KK, jadi realisasi capaian sebanyak 67,48 %.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 75 % sedangkan realisasi sebanyak 67 %. Persentase capaian adalah 89,98%.* Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2023.*.*

* 1. ***Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial***

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

1. Kegiatan pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, dengan target sebanyak 208 KPM dan terealisasi sebanyak 208 KPM.
2. Program Nasional berupa pemberian bantuan iyuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2022 jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 56.042 jiwa.
3. Program Keluarga Harapan (PKH), juga merupakan program nasional yang berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki 3 komponen PKH diantaranya

* komponen pendidikan yaitu yang memiliki anak usia sekolah SD sampai SMA
* Komponen Kesatan yaitu masyarakat miskin yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun serta wanita hamil dan menyusui.
* Komponen kesejahteraan yaitu masyarakat miskin yang memiliki lanjut usia diatas 70 tahun atau penyandang disabilitas.

Jumlah penerima PKH untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahap III tahun 2023 sebanyak 7.127 KPM

1. Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nominal bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 / KPM yang disalurkan oleh Bank Himbara kemudian oleh PT Pos untuk tahap III. Jumlah penerima Program Sembako untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 10.518 KPM.
2. Bantuan Langsung Tunai – EL NINO dengan nominal bantuan Rp. 200.000/bulan selama 2 Bulan yakni November s/d Desember dengan jumlah penerima sebanyak 10.521 KPM untuk anggaran APBN.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial selama tahun 2023 sebanyak 10.729 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KPM, jadi realisasi capaian sebanyak 61,07 %.

*Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 90 % sedangkan realisasi sebanyak 61,07 %. Sehingga Persentase capaian adalah 67,85 %, namun untuk Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) dan PBU Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sudah UHC yang artinya hamper 100 % penduduk kepulauan Selayar sudah memiliki kartu jaminan kesehatan.*

1. ***Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”***

Dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran diatas yaitu:

***2.1 Persentase penanganan korban bencana***

Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan inidikator diatas antara lain :

1. Perlinduangan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota

* Penyediaan Makanan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 40 KPM dan terealisasi 100 %
* Penyediaan Sandang, kegiatan ini berupa pemberian bantuan seng terhadap korban bencana yang jumlahnya tergantung dari kerusakaan akibat bencana tersebut yang di hitung berdasarkan hasil assesmen dari anggota Tagana dengan target 30 KPM dan terealisasi 100 %
* Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, kegiatan ini diperuntukkan untuk para korban yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti kapal terdampar, orang hilang dan lain sebagainnya, juga memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asalnya dengan Target 10 Orang dan terealisasi 2 Orang

1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

* Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, kegiatan ini memfasilitasi para anggota Tagana dalam melakukan aktivitasnya terutama pada saat tanggap darurat, dan pada saat evakuasi bencana.

Jumlah anggota tagana yang difasilitasi sebanyak 22 orang dengan pembagian tugas masing-masing kecamatan memiliki 2 orang anggota Tagana.

1. Bantuan APBN Kementerian Sosial  
   - Bantuan APBN ini di peruntukan untuk para Korban Bencana jumlah Bantuan tersebut berdasarkan hasil assemen dari anggota Tagana, jumlah korban bencana yang di berikan bantuan 106 KK, dan bantuan yang di berikan berupa selimut, Kasur, makanan siapsaji,biscuit,alat mandi,Beras,air minum,baju,sarung dll.

*Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban bencana yang tertangani selama tahun 2023 untuk APBD sebanyak 72 KK dan APBN sebanyak 106 KK dengan total sebanyak 178 KK dan jumlah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 178 KK atau sebanyak 100 %.*

b. **Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial dengan realisasinya. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Dinas Sosial semakin baik apabila realisasinya semakin tinggi dan akan tidak baik pencapaian kinerjanya apabila semakin rendah realisasinya. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan urusan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial**

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
| 1 | **2** |  | **3** | **4** | **5=(4/3)\*100** | **6** |
| 1 | **Urusan Sosial** |  |  |  |  |  |
|  | **Dinas Sosial** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabiltas. | % | **0** | **0** | **0** |  |
|  | 1. PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial | % | **75%** | **70,62%** | **94,16%** |  |
|  | 1. Penanganan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial | **%** | **90%** | **71,63%** | **79,59** |  |

*Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.*

* + 1. **Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Berikut hasil Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas sosial Tahun 2023 :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja** | | | | | | | | | |
|  |
| **No.** | **Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah** | **Target Anggaran (Rp)** | **Realisasi Anggaran(Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Capaian Realisasi Anggaran (%)** | **Jumlah Indikator Kinerja Program** | **Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program** | **Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan** | **Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| **1** | **Urusan Sosial** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dinas Sosial** | **Rp.7.967.615.000** | **Rp.7.791.564.888** | **Rp.176.050.112** | **97,79%** | **6** | **100** | **15** | **100** |  |
|  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rp3.290.765.000** | **Rp3.145.063.288** | **Rp145.701.712** | **95,57%** | **1** | **100** | **7** | **100** |  |
|  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp167.940.000 | Rp167.787.020 | Rp152.980 | 99,91% | 1 | 100 | 7 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp1.929.025.000 | Rp1.811.632.430 | Rp117.392.570 | 93,91% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah | Rp5.000.000 | Rp4.940.000 | Rp60.000 | 98,80% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp5.000.000 | Rp4.950.000 | Rp50.000 | 99,00% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp635.000.000 | Rp634.144.933 | Rp855.067 | 99,87% | 1 | 100 | 4 | 100 |  |
|  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusuan Pemerintah Daerah | Rp322.060.000 | Rp300.298.006 | Rp21.761.994 | 93,24% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp226.740.000 | Rp221.310.899 | Rp5.429.101 | 97,61% | 1 | 100 | 4 | 100 |  |
|  | **Program Pemberdayaan Sosial** | **Rp250.000.000** | **Rp249.141.600** | **Rp858.400** | **99,66%** | **1** | **100** | **1** | **100** |  |
|  | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota | Rp250.000.000 | Rp249.141.600 | Rp858.400 | 99,66% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | **Program Rehabilitasi Sosial** | **Rp3.806.977.000** | **Rp3.793.036.800** | **Rp13.940.200** | **99,63%** | **1** | **100** | **2** | **100** |  |
|  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelendangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Rp1.522.457.000 | Rp1.518.277.400 | Rp4.179.600 | 99,73% | 1 | 100 | 12 | 100 |  |
|  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial | Rp2.284.520.000 | Rp2.274.759.400 | Rp9.760.600 | 99,57% | 1 | 100 | 7 | 100 |  |
|  | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **Rp193.380.000** | **Rp193.163.800** | **Rp216.200** | **99,89%** | **1** | **100** | **2** | **100** |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar | Rp100.000.000 | Rp99.910.000 | Rp90.000 | 99,91% | 1 | 100 | 2 | 100 |  |
|  | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp93.380.000 | Rp93.253.800 | Rp126.200 | 99,86% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | **Program Penanganan Bencana** | **Rp406.493.000** | **Rp391.196.400** | **Rp15.296.600** | **96,24%** | **1** | **100** | **2** | **100** |  |
|  | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Rp173.701.000 | Rp160.054.400 | Rp13.646.600 | 92,14% | 1 | 100 | 3 | 100 |  |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/ Kota | Rp232.792.000 | Rp231.142.000 | Rp1.650.000 | 99,29% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | **Rp20.000.000** | **Rp19.963.000** | **Rp37.000** | **99,82%** | **1** | **100** | **1** | **100** |  |
|  | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota | Rp20.000.000 | Rp19.963.000 | Rp37.000 | 99,82% | 1 | 100 | 1 | 100 |  |

* + 1. **Inovasi**

Pelaksanaan pembangunan dengan berbagai permasalahannya dapat diurai dengan berbagai inovasi. Inovasi dapat berupa menciptakan sesuatu yang baru  atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dengan berdasarkan pada pemikiran dan tujuan untuk  Peningkatan Pemberian Pelayanan Publik.

**Tabel 2.5. Inovasi pada Dinas Sosial Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN INOVASI | MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI | HASIL/MANFAAT | KET. |
| 1 | SMART BANSOS | Terwujudnya penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar secara tepat sasaran dan tersedianya data bansos APBD yang akurat dan akuntabel. | * Memudahkan pengelolaan data secara cepat dan efisien. * Penyajian data bansos APBD yang lengkap,valid dan akurat. * Meminimalisir terjadinya data ganda dalam penyaluran bansos. * Penyaluran bansos yang tepat sasaran. * Dapat mencegah temuan terhadap penyalahgunaan bansos. |  |

*Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023*

* + 1. **Prestasi/Penghargaan**

**Tabel 2.6. Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Penghargaan | Tingkat | | | | Diselenggarakan Oleh/Penyelenggara | Ket. |
| **Internasional** | **Nasional** | **Provinsi** | **Kabupaten** |  |
| 1 | Organisasi perangkat daerah mendapatakan pendampingan penyusunan Meta Data |  |  |  | **√** | Badan Pusat Statistik Kabupaten kepulauan selayar |  |
| 2 | Pertandigan Gerak jalan |  |  |  | **√** | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |  |
| 3 | Pertandingan kemebersian Kantor |  |  |  | **√** | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |  |

* 1. **Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah**

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Strategis yang ditetapkan Dinas Sosial dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang diambil dalam satu tahun anggaran dituangkan ke dalam sebuah laporan. Laporan tentang kebijakan yang diambil Kepala Dinas Dinas Sosial dituangkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.7. Kebijakan Strategis Dinas Sosial Tahun 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | | Tujuan/Masalah  Yang Diselesaikan | Ket. |
| **Nomor/Tanggal Pengesahan** | **Tentang** |
| 1. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 607/X/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Pada Dinas Sosial Kabupaten Selayar Tahun Anggarabn 2023 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 2. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 192/III/TAHUN 2023 | Penetapan sasaran Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 3. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 292/VIII/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pemberian Reunifikasi Keluarga Pahlawan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2023 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 4. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 370/VI/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Bantuan Pada Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar Tahun Anggaran 2023 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 5. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 6/I/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Anggota Taruna Siaga Bencana Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 | Menjadi Patokan dasar dalam Pembayaran Tali Asi | SK |
| 6. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 545/IX/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Bantuan sandang pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Tahun Anggaran 2023 | Menjadi Patokan/ dasar dalam Penyaluran Bantuan | SK |
| 7. | Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar | NOMOR: 340/VI/TAHUN 2023 | Penetapan Penerima Bantuan Pada Kegiatan Pemeliharaan Anak – anak Terlantar Tahun Anggaran 2023 | Menjadi Patokan dasar dalam Pembayaran Tali Asi | SK |

* 1. **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 2.8. Tindak Lanjut Rekomnedasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Rekomendasi DPRD | Tindak Lanjut | Tujuan Masalah yang Diselesaikan |
| 1. | **-** | - | **-** |

Sumber: Data *Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023*

**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS**

**PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

* 1. **Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan**

**(NIHIL)**

* 1. **Hambatan-Hambatan  
     (NIHIL)**

**BAB IV**

**PENUTUP**

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja yang dilakukan dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini, pada pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Sosial Hidup Kabupaten Kepulaun Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Benteng, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kepulauan Selayar,

**Hj. SATMAWATI,S.Sos.,M.A.P**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730217 199803 2 011